



Jurnal Tata Sejuta Vol 11 No 2 Oktober 2025

Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM

<http://ejurnalstiamataram.ac.id>

P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DOMPU)

Nurul Rahmania¹, Abdurrahman², M. Ariy Dermawan S³

¹²³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 13 Mei 2025

Disetujui: 23 Mei 2025

Dipublikasikan: 15

Oktober 2025

Kata Kunci:

kebijakan pengelolaan sampah, peraturan daerah, partisipasi publik, kabupaten dompu

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu menjadi tantangan besar dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, pelaksanaan kebijakan ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya dukungan anggaran. Di sisi lain, terdapat komitmen dari pelaksana teknis di lapangan yang menjadi modal awal dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi publik yang berkelanjutan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna mendukung keberhasilan kebijakan ini.

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF 2017 ON WASTE MANAGEMENT (A STUDY AT THE ENVIRONMENTAL AGENCY OF DOMPU REGENCY)

Keywords:

Waste management, policy implementation, Regional Regulation, Dompu Regency, public awareness, institutional capacity, inter-agency coordination.

Abstract

Waste management in Dompu Regency remains a major challenge in achieving a clean and healthy environment. Although Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning Waste Management has been issued, the implementation of this policy has not yet produced optimal results. This study aims to analyze the implementation of the regulation and identify the supporting and inhibiting factors affecting its execution. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including field observations, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the main obstacles to policy implementation include a lack of public outreach, limited facilities and infrastructure, weak inter-agency coordination, and insufficient budgetary support. On the other hand, the commitment of technical implementers on the ground serves as a

foundational asset for achieving a sustainable waste management system. Therefore, strategies such as strengthening institutional capacity, continuous public education, and enhanced cross-sector coordination are necessary to support the success of this policy.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

* Alamat korespondensi:

nianurul1994@gmail.com¹, drs.habdurrahman@gmail.com², ariy.dermawan@ummat.ac.id³

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tinggi. Di Indonesia, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah klasik yang belum tertangani secara efektif, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang menyangkut minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga keterbatasan sarana prasarana pendukung. Pemerintah Kabupaten Dompu, sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menunjukkan komitmennya dalam menangani permasalahan ini dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini dimaksudkan sebagai langkah sistematis, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan untuk mengelola sampah secara terpadu dari hulu ke hilir.

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi beragam hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, ditemukan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi mencakup rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan membuang sampah pada tempatnya, keterbatasan fasilitas seperti TPS (Tempat Pembuangan Sementara), serta kurangnya kendaraan operasional dan anggaran kebersihan. Selain itu, lemahnya pengawasan serta ketidaksesuaian antara regulasi dan kondisi sosial masyarakat turut mempersulit efektivitas kebijakan ini.

Hasil temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang juga mengungkap berbagai kendala serupa dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Misalnya, penelitian di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas TPS dan ketidakmerataan pelayanan pengelolaan sampah menjadi hambatan utama dalam penerapan Perda Pengelolaan Sampah (Wahyuni, 2020). Di Kota Dumai, keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan lingkungan (Nasution, 2021). Penelitian di Kabupaten Bandung juga menegaskan pentingnya koordinasi kelembagaan dan dukungan sarana prasarana agar kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif (Saputra & Yulianto, 2019). Selain itu, evaluasi implementasi Perda di Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dukungan institusi, dan partisipasi masyarakat (Harahap, 2022). Sementara itu, studi di Kota Payakumbuh menambahkan bahwa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah (Amiruddin, 2020).

Kehadiran berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi kebijakan pengelolaan sampah ternyata bersifat multi-dimensi, melibatkan faktor kelembagaan, teknis, sosial, dan kultural. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara formulasi kebijakan dengan realitas di lapangan. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor penyebab tidak optimalnya implementasi kebijakan Perda No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu. Apakah kendala utama memang terletak pada aspek kendaraan, anggaran, fasilitas TPS, atau terdapat faktor lainnya yang lebih dominan dan belum banyak disorot dalam studi-studi sebelumnya.

Dalam kerangka teoritik, Merilee S. Grindle (dalam Abdal, 2015) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama: isi kebijakan (*Content Of Policy*) dan konteks implementasi (*Context Of Implementation*).

Commented [a1]: Penulisan regulasi harus lengkap

Dimensi isi kebijakan berfokus pada isi dan karakteristik kebijakan itu sendiri, yang mencakup beberapa aspek kunci, yaitu: kepentingan para pihak yang terpengaruh oleh kebijakan, manfaat yang diharapkan dari kebijakan, derajat perubahan yang diinginkan, posisi dan peran aktor pengambil keputusan, pelaksana kebijakan, serta tersedianya sumber daya yang diperlukan. Grindle menekankan bahwa jika isi kebijakan tidak dirancang dengan jelas dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan secara efektif. Misalnya, kebijakan yang terlalu ambisius tanpa dukungan sumber daya memadai berpotensi gagal diterapkan.

Sementara itu, konteks implementasi menyoroti lingkungan di mana kebijakan dilaksanakan. Ini meliputi dinamika kekuasaan dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik institusi pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan respons dari pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, Grindle menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti konflik kepentingan antar aktor, kapasitas institusi, budaya organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia sangat menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan. Jika konteks ini tidak kondusif, maka kebijakan yang baik sekalipun akan mengalami hambatan.

Pendekatan teori Grindle ini sangat relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan **Perda No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu**, karena memberikan kerangka yang holistik dalam melihat tidak hanya isi kebijakan itu sendiri tetapi juga kondisi nyata di lapangan yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan memisahkan analisis antara isi kebijakan dan konteks implementasi, penelitian ini dapat mengidentifikasi secara rinci faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan aplikatif untuk peningkatan tata kelola sampah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2017** tentang pengelolaan sampah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena

Commented [a2]: Penulisan regulasi harus lengkap

Commented [a3]: Penulisan regulasi harus lengkap

sosial yang kompleks dan memerlukan pemahaman kontekstual dari perspektif pelaku kebijakan maupun masyarakat.

Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Dompu, khususnya pada wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan instansi teknis pelaksana kebijakan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti kepala dinas, staf lapangan, dan warga masyarakat yang berada di wilayah terdampak langsung oleh implementasi kebijakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam terkait pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun informan utama dalam penelitian ini antara lain: J (Kepala Dinas), D (staf pelaksana), dan E (perwakilan masyarakat). Inisial digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan tanpa mengurangi validitas data yang diperoleh dalam penelitian.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumen kebijakan, laporan kegiatan dinas, serta arsip berita terkait pelaksanaan kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap kegiatan operasional pengangkutan sampah, fasilitas pendukung, serta perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah Perda Nomor 10 Tahun 2017 serta dokumen pendukung lainnya seperti program kerja dan laporan evaluasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan lapangan secara tematik. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola yang muncul dalam data serta dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan yang digunakan sebagai kerangka analisis.

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat temuan dan menghindari bias interpretatif (Suryani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dalam menciptakan lingkungan

yang bersih dan sehat, digunakan kerangka analisis dua dimensi implementasi menurut Grindle dalam Tresiana dan Daudji (2019:59), Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Dua dimensi ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan kelembagaan tertentu seperti di Dompu.

Dimensi *isi kebijakan* menyoroti sejauh mana substansi kebijakan mampu mendukung keberhasilan implementasi. Analisis mencakup enam elemen: (1) *kepentingan yang terdampak*, yaitu pihak-pihak yang terlibat dan merespons kebijakan; (2) *manfaat yang diperoleh*, seperti peningkatan kualitas lingkungan; (3) *derajat perubahan yang diharapkan*, menyangkut transformasi perilaku dan sistem pengelolaan; (4) *kedudukan pengambilan keputusan*, yakni struktur otoritas dalam pelaksanaan; (5) *pelaksana program*; dan (6) *sumber daya yang tersedia*, termasuk anggaran, SDM, dan infrastruktur.

Sementara itu, *konteks implementasi* mencakup tiga aspek utama: (1) *kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor*, yaitu dinamika interaksi antar pelaksana dan pemangku kepentingan; (2) *karakteristik institusi pelaksana*, seperti struktur organisasi dan kapasitas lembaga; serta (3) *respons dan kepatuhan pelaksana*, yaitu sejauh mana kebijakan dijalankan sesuai tujuan. Kerangka Grindle ini membantu menganalisis hubungan antara substansi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi implementasi kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif.

Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Isi kebijakan merujuk pada sejauh mana muatan substansi dari suatu peraturan memiliki kapasitas untuk mendorong keberhasilan implementasi. Kebijakan yang disusun dengan memperhatikan kepentingan publik, potensi manfaat nyata, serta sasaran yang tepat akan lebih mudah diimplementasikan (Grindle dalam buku Agustino L, 2022).

a. Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Program

Dalam konteks Dompu, sasaran utama dari kebijakan ini adalah seluruh masyarakat, mengingat setiap individu menjadi produsen sampah dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah harus ada organisasi atau perangkat daerah yang bertanggung jawab akan hal pengelolaan sampah. Adanya perda ini bagaimana pengelolaan sampah dengan baik agar mengurangi sampah yang masuk ke TPA

agar bisa dikelola dengan baik. Kepentingan dalam urusan pengelolaan sampah merupakan bagian dari kepentingan masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga nyaman untuk ditempati. Adanya kebijakan ini sebagai acuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu dan terlibatnya aktor atau organisasi dalam pengelolaan sampah tersebut. Menurut Iskandar et al. (2020) dalam jurnal *Public Policy and Administration Review*, keterlibatan masyarakat sejak awal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran lingkungan. Jika kelompok sasaran tidak menyadari adanya kebijakan atau merasa tidak dilibatkan, maka peluang keberhasilannya menjadi kecil.

Oleh karena itu, penting bagi organisasi atau perangkat daerah dalam tanggung jawab pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah bisa terkelola dengan baik. Kepentingan masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam pengelolaan sampah dengan adanya kebijakan ini masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan yang ditempatinya.

b. Manfaat yang Diperoleh

Secara ideal, kebijakan pengelolaan sampah ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari penyakit berbasis lingkungan. Akan tetapi, berdasarkan data observasi di lapangan, manfaat dari kebijakan ini dapat terkelola dengan baik karena adanya program pengangkutan sampah yang menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan sampah. Pengangkutan sampah juga menjadi salah satu solusi dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Program ini memberikan manfaat besar kepada masyarakat dengan mendorong mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Rahmadita Putri dkk. (2023) dalam jurnal *PPMI: Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia*, yang mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pengangkutan sampah memegang peran vital dalam menjaga kebersihan lingkungan kota, namun efektivitasnya sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas dan kendaraan operasional. Ketika alat berat dan truk pengangkut sudah tidak layak digunakan, maka upaya pengangkutan menjadi

terhambat, sehingga mengurangi keberhasilan program kebersihan secara keseluruhan (Putri et al., 2023).

c. Derajat Perubahan yang Di Kehendaki

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan target perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, termasuk melalui program pemilahan sampah dari rumah dan pengurangan sampah plastik. Namun, perubahan tersebut membutuhkan waktu, proses edukatif, serta dukungan infrastruktur. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dompu melaporkan bahwa cakupan layanan pengangkutan sampah mencapai 87,9% pada tahun 2023, capaian ini masih belum merata dan didominasi wilayah perkotaan. Di daerah pedesaan, pengangkutan masih mengandalkan swadaya masyarakat atau bahkan tidak tersedia sama sekali.

Penelitian oleh Rizal Rohdianto, Rachmawati Novaria, dan Adi Soesiantoro (2024) dalam jurnal *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* menyoroti bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang efektif memerlukan komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, struktur birokrasi yang jelas, dan disposisi atau sikap yang mendukung dari para pelaksana kebijakan. Tanpa adanya pendekatan transformatif dan komprehensif, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah cenderung bersifat sementara dan tidak sistemik. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari Perda No. 10 Tahun 2017 secara efektif, diperlukan strategi implementasi yang menyeluruh, termasuk peningkatan fasilitas infrastruktur, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta dukungan regulasi dan insentif yang memadai.

d. Kedudukan Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Perda No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah sudah sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bupati Dompu dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dalam pengambilan keputusan kebijakan Perda No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Grindle (dalam buku Agustino L, 2022), pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan

dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksana Program

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pelaksana program Perda No. 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah telah menunjukan hasil positif dan sudah berjalan dengan baik dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipatif masyarakat dalam program pengelolaan sampah juga meningkat dengan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Program pengelolaan sampah juga dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat sangat puas dengan adanya pelaksanaan program pengelolaan sampah yang sudah berjalan dengan baik di lingkungan masyarakat.

Menurut Grindle (dalam buku Agustino L, 2022), pelaksanaan program dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. Sumber Daya yang Digunakan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa sumber daya yang digunakan dalam implementasi Perda No. 10 Tahun 2017 masih belum mencukupi, baik dari aspek anggaran, personel, maupun infrastruktur. Banyak desa belum memiliki armada pengangkut sampah, jumlah petugas kebersihan masih terbatas, dan tidak semua Tempat Penampungan Sementara (TPS) memiliki fasilitas yang sesuai standar. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan sampah secara menyeluruh di Kabupaten Dompu. Grindle (dalam buku Agustino L, 2022) pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Lingkungan Kebijakan (*Context Of Policy*).

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa kekuasaan dan strategi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu masih terpusat pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai aktor utama. Dalam praktiknya, DLH telah berupaya menggerakkan strategi pelaksanaan melalui edukasi, sosialisasi masyarakat. Strategi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada

masyarakat adalah dengan cara memberikan informasi tentang pengelolaan sampah. Dalam informasi Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dalam upaya pengelolaan sampah. Namun, Informasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat belum optimal dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu menyediakan akses informasi agar masyarakat dapat mudah mengetahui informasi tentang kebijakan Perda No. 10 Tahun 2017.

Menurut Grindle (dalam buku Agustino L, 2022) menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Ketika kekuasaan hanya tersentral pada satu aktor dan strategi yang digunakan tidak mampu menggerakkan koalisi kebijakan yang luas, maka keberhasilan implementasi menjadi tidak optimal. Situasi ini diperburuk dengan rendahnya keterlibatan masyarakat yang menganggap pengelolaan sampah hanya menjadi tanggung jawab DLH semata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi dan kekuasaan aktor utama belum cukup efektif dalam mendorong keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Dompu.

b. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana dalam implementasi kebijakan juga menjadi faktor krusial. Berdasarkan observasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu sebagai institusi pelaksana memiliki struktur yang memadai secara administratif, salah satu faktor yang membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki karakteristik yang baik adanya ketegasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam memimpin dan mengarahkan pegawai dalam melakukan tugas masing-masing.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Grindle (dalam buku Agustino L, 2022) lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

c. Respons dan Kepatuhan Pelaksana

Respons dan kepatuhan pelaksana kebijakan menjadi indikator penting dalam konteks implementasi. Berdasarkan temuan lapangan, petugas kebersihan dan pelaksana teknis di tingkat lapangan menunjukkan sikap kooperatif dan bertanggung jawab. Mereka melaksanakan tugas sesuai instruksi

yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk bertanggung jawab dalam menjalankan implementasi kebijakan. Kepatuhan pegawai sangatlah konsisten dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan arahan kepala dinas dan respon pegawai dalam menerima pekerjaan sangatlah baik dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Grindle (dalam Agustino L, 2022) menjelaskan hal lain yang dirasakan penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana. Maka pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

kepatuhan pelaksana tidak semata-mata ditentukan oleh kemauan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sistemik dari struktur organisasi, ketersediaan sarana, dan insentif kerja. Ketika pelaksana bekerja dalam keterbatasan, maka implementasi kebijakan cenderung mengalami deviasi dari desain awal.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan secara optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya komunikasi kebijakan, terbatasnya sumber daya pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat komitmen dari pelaksana kebijakan di tingkat teknis, hal tersebut tidak cukup untuk mengimbangi persoalan struktural dan kultural yang melekat dalam proses implementasi. Substansi kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Sebagai implikasi teknis dari temuan ini, diperlukan penguatan sistem komunikasi kebijakan melalui kegiatan sosialisasi yang masif dan terstruktur dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program edukasi masyarakat, sosialisasi masyarakat, dan rumah tangga agar tercipta budaya sadar kebersihan secara berkelanjutan. Dari sisi kelembagaan, perlu ditingkatkan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk peremajaan armada dan penambahan personel yang kompeten. Selain itu, penting untuk mendorong terbentuknya kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam model pengelolaan sampah berbasis kolaborasi agar kebijakan ini

dapat berjalan secara lebih efektif dan berdampak luas bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A., & Septiani, D. (2020). Strategi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 33–45.
- Agustino L (2022). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: ALFABETA, Cv.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kabupaten Dompu. (2017). *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 173. [Http://Repository.Unimal.Ac.Id/3602/1/Pertemuan2kebijakan.Pdf](http://Repository.Unimal.Ac.Id/3602/1/Pertemuan2kebijakan.Pdf)
- Saraswati, P. P. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Is. *Jurnal Respon Publik*, 17(12), 55–65.
- Stiawan, A. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tetang Pengelolaan Sampah Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu [Skripsi]*. Muhammadiyah Mataram.
- Suryani. (2018). Strategi Public Relations Pt Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations. *Ejournal*, 9(9), 1–9. <https://www.google.com/search?q=Analisis+Data+Menurut+Sugiyono+%282018%29+Adalah+Proses+Mencari+Dan+Menyusun+Secara+Sistematis+Data+Yang+Diperoleh+Dari+Hasil+Wawancara%2c+Catatan+Lapangan+Dan+Dokumentasi%2c+Dengan+Cara+Mengorganisasikan+Data+Ke+Dalam+Kate>
- Amiruddin. (2020). *Analisis Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Dan Recycle (3r) Pada Masyarakat Di Kota Payakumbuh*. *Jurnal Ilmiah Lingkungan*, 5(2), 123-134. Diakses Dari
- Harahap, R. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kapuas*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45-60. Diakses Dari

Commented [a4]: Perhatikan jenis huruf, dan besar font yang digunakan, jangan menggunakan berbagai ragam jenis huruf dan font

- Nasution, M. (2021). *Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Serta Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Dumai*. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(3), 78-89. Diakses Dari <https://www.slideshare.net/slideshow/jurnal-meryyst1pdf/261875552>
- Saputra, T., & Yulianto, B. (2019). *Policy Evaluation In Waste Bank In Sukarama Village, Pacet District, Bandung Regency*. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 4(2), 112-123. Diakses Dari
- Wahyuni, S. (2020). *Analisis Kendala Implementasi Perda Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumedang*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Putri, N. R., Marhayani, A., & Purwaningsih, I. (2023). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya*. *Ppmi: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Indonesia*.
- Rohdianto, R., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Perspektif Teori George C. Edwards Iii (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar). *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 8(1), 10–21.